

DAFTAR PUSTAKA

a) Buku

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Graniat, 2004.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Ketatanegaraan*. Jakarta: The Biography Institute, 2007.
- . *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- . *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- . *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- . *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Basah, Sjachran. *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1985.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dewi, Eli Wuria. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Dicey, Albert Venn. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan Press, 1979.
- Efendi, A'an, and Dyah Ochtorina Susanti. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Emanuel, Steven L. *Constitutional Law*. Twenty-Eight. New York: Aspen Publishers, 1976.
- Fahmi, Khairul. *Pembatasan Hak Pilih Warga Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- . *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- Hayek, F. A. *The Constitution of Liberty*. Edited by Ronald Hamowy. Chicago: University of Chicago Press, 2011.
- Huda, Nikmatul, Dian Kus Pratiwi, Muhammad Addi Fauzani, Retno Widiastuti, Yuniar Riska Hakiki, Mafdan Maftukha Assyatuti, and Rahmadina Bella Mahmuda. *Naskah Kajian: Gagasan Kewenangan Pengaduan Konstitusional*

- Dan Desain Kelembagaannya Di Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2025.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan kedua. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ibrahim, Moh. Kusnardi & Harmaily. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti, 2003.
- . *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 1983.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Isharyanto. *Fasilitasi Legislasi Dalam Penguatan Perlindungan Sosial (Otonomi Daerah Dan Desentralisasi)*. Jakarta: Moeka Publishing, 2020.
- Asmaeny dan Izlindawati. *Constitutional Complaint Dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2018.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. *Menata Langkah Maju: Kajian Perkembangan Kebijakan Penyikapan Konflik Selama 20 Tahun Reformasi Untuk Pemajuan, Pemenuhan HAM Perempuan Dan Pembangunan Perdamaian*. Edisi Peluncuran. Jakarta Pusat: Komnas Perempuan, 2018.
- Komnas HAM Republik Indonesia. *Standar Norma Dan Pengaturan Tentang Hak Untuk Bebas Dari Penyiksaan, Perlakuan Atau Penghukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia*. Jakarta: Komnas HAM RI, 2022.
- Lev, Daniel S. *Hukum Dan Politik Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2024*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Putusan, 2025.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017.
- Manan, Bagir. *Membedah UUD 1945*. Cetakan Pertama. Malang: Tim UB Press, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2005.
- MD, Mahfud. *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Salim, H.S. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta:

- Sinar Grafika, 2011.
- . *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Sinamo, Nomensen. *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*. Jakarta: JalaPermata Aksara, 2010.
- Soemantri, Sri. *Hak Menguji Material Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1986.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soerjono, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Srimarga, Ilham Cendikia, Markus Christian, Dati Fatimah, Hasrul Hanif, and Tri Lindawati. *Laporan Alternatif Hak Ekosob: Pendidikan, Kesehatan, Dan Pangan*. Jakarta Selatan: Pusat Telaah dan Informasi Regional, 2001.
- Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Syafi'ie, M. "DUHAM Dan Kovenan." In *Jamuan Ilmiah Tentang Hukum Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Pendidik Akademi Kepolisian Semarang*. Semarang: Komnasham, 2017.
- Syahrizal, Jimly Asshiddiqie & Ahmad. *Peradilan Konstitusi Di 10 Negara*. Jakarta Timur: PT Sinar Grafika, 2012.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Thaib, Dahlan. *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, n.d.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Universitas Sebelas Maret (TiM A). *Academic Constitutional Drafting: Rancangan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terkait Dengan Pokok-Pokok Haluan Negara*. Jakarta Pusat: Badan Pengkajian MPR RI, 2021.
- Wibowo, Mardian. "Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang." In *Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus Dan Anggota Organisasi Mahasiswa Lintas Agama*, 1–24. Cisarua: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MKRI, 2018.
- Widayati. *Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Pemerintahan Indonesia*. Semarang: Unissula Press, 2020.
- Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I*. Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.

b) Jurnal

- Abdurrahman, Danna Muhamad Bagas, and Azka Patria Fauzi. "Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power) Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Perspektif Sovereign Immunity." *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* Volume 1, no. 12 (2022): 2999–3006.
- Ackerman, Bruce. "The New Separation of Power." *Harvard Law Review* Volume 133, no. 3 (2000): 642–729.
- Aditama, I Made Kresna Sanjaya, Made Sugi Hartono, and Dewa Bagus Sanjaya. "Pembaruan Hukum Pidana Sebagai Jalan Menuju Keadilan Yang Humanis." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Volume 4, no. 3 (2026): 2666–74.
- Al'anam, Muklis, and Hendro Prabowo. "Reformasi Mekanisme Eksekusi Putusan Pengadilan Tata usaha Negara : Pelajaran Dari Sistem Peradilan Administrasi Belanda." *Jurnal Reformasi Hukum* Volume 29, no. 2 (2025): 184–200.
- Alam, Ruben Nicholas, David Lestarius Immanuel Baeha, Kezia Estevania Eliezer Christabel, and Rasji. "Penyalahgunaan Kekuasaan Eksekutif Dalam Sistem Ketatanegaraan." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* Vol. 7, no. 5 (2025): 3509–17.
- Aruan, Bagas Christofel, and Joko Setiyono. "Meninjau Ratifikasi Perjanjian Internasional Di Indonesia (Studi Perjanjian Indonesia-Singapura Tentang Flight Information Region." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Volume 52, no. 3 (2023): 292–300.
- Atqiya, Ashfiya Nur, Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Erlina Hendratama Putri, Najwa Mudya Prameswati, and Sri Indah Dian Purnamasari. "Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Negara Demokrasi : Perspektif Konstitusional Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Pendidikan Dan Kewarnegaraan Indonesia* Volume 2, no. 2 (2025): 174–86.
- Bahri, Syamsul. "Hukum Pidana Sebagai Instrumen Penegakan Keadilan Dan Upaya Meminimalisir Pelanggaran Hukum Dalam Masyarakat." *Ameena Journal* Volume 2, no. 4 (2024): 425–36.
- Bawamenewi, Adrianus. "Implementasi Hak Politik Warga Negara." *Jurnal Warta Edisi*, 2019, 43–56.
- Bisariyadi. "Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional." *Jurnal Konstitusi2* Volume 14, no. 1 (2017): 22–44.
- Chirwa, Danwood Mzikenge. "The Doctrine of State Responsibility as a Potential Means of Holding Private Actors Accountable For Human Rights." *Melbourne Journal of International Law* Volume 5 (2004): 1–36.
- Coleman, Michael, and Michael G. Colantuono. "Toward Fiscal Authority and Stability: Power and Risk in California City Revenues," 2003, 26–31.
- Dasuha, Deniro Fadjar Fachriza Purba, and Budiman Sinaga. "Rekonstruksi Kebijakan Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif Di Indonesia." *Jurnal ISO:*

Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora Volume 6, no. 1 (2026): 1-10.

- Efendi, A'an. "Putusan Mahkamah Konstitusi Melebihi Kewenangan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020." *Jurnal Yudisial* Vol. 17, no. 1 (2024): 106–27.
- Endita, Sazkia Putri, Arya Dwi Bramantio, Monica Sandani, Zeta Angelina Madius, and Suci Ramadhani. "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Pelanggaran HAM Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2024): 334–41.
- Furqoni, Vicko Taniadi & Laili. "Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi: Penerapan Constitutional Complaint Dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara." *JJR* Vol. 24, no. 1 (2022): 135–48.
- H, Asyhana Gema, and Doni H. Silaban. "Identifikasi Abuse of Power Dugaan Suap Hakim Agung Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Lex Suprema* Volume 6, no. II (2024): 118–33.
- Hafendi, Doni, and Wilma Silalahi. "Diskresi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum: Kajian Terhadap Kewenangan Kepolisian Berdasarkan UU Kepolisian." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* Volume 5, no. 12 (2024): 1–24.
- Hairi, Prianter Jaya. "Menelaah Pengaturan Constitutional Complaint Dalam Revisi UU Mahkamah Konstitusi." *Info Singkat* Vol. XV, no. 4 (2023): 7–12.
- Hakim, Arief Rachman, and Yulita Dwi Pratiwi. "Positive Legislature Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Konstitusi* Vol. 19, no. 4 (2022): 933–56.
- Hamonangan, Alexsander Roy Happy, Hotma P Sibuea, Ika Dewi Sartika Saimima, and Edi Saputra Hasibuan. "Peniadaan Pemidanaan Terhadap Perbuatan Yang Mengakibatkan Kerugian Negara Dalam Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Indonesia." *Unes Law Review* Vol. 6, no. 3 (2024): 8766–80.
- Hartati, Widya, Sandi Ary Wijaya, and Salmi Yuniar Bahri. "Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Administrasi Negara Terhadap Keputusan Tata usaha Negara Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Tata usaha Negara." *Parlemonter: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* Volume 1, no. 4 (2024): 193–200.
- Hasan, Riskiyawan. "Urgensi Constitutional Complaint Dalam Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara." *Staatrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* Vol. 3, no. 1 (2023): 71–90.
- Hermawanto, Fauzan, Muh. Cendikiawan Ainul Haq, Ghaffar Ramdi, and Mawardi. "Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Anggota Lembaga Legislatif." *Jurnal Kolaboratif Sains* Volume 8, no. 1 (2025): 499–505.
- Hidayat, Ghina Ulayya, Deslita Kayla Nasywa, Prilanitasari, and Tugimin Supriyadi. "Pengaruh Dinamika Organisasi Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum." *Journal OfSocial Sciences* Volume 1, no. 4 (2024): 68–76.
- Husni, Bambang Sugiono & Ahmad. "Supremasi Hukum Dan Demokrasi." *Jurnal Hukum* Volume 7 (2000): 71–82.
- Iqbal, Moch. "Aspek Hukum Class Action Dan Citizen Law Suit Serta." *Jurnal Hukum*

*Dan Peradilan*2 Volume 1, no. 1 (2012): 89–112.

- Ismaidar, Muliyani, Lucas Butar Butar, Cilcia Pratiwi, and Dinda Rahayu Harahap. “Restitusi Dalam Hukum Perdata Indonesia: Konsep, Dasar Hukum, Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Sengketa.” *Jurnal Kebijakan Reformasi Hukum* Volume 9, no. 12 (2025): 32–36.
- Jannah, Miftahul, and Fatmawati. “Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syarah Syar’iyyah* Volume 3, no. 1 (2022): 52–62.
- Jasmadi, Moh. Yamin, and Slim Okrapani. “Peran Konstitusi Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE Di Era Demokrasi.” *Collegium Studisium Journal* Volume 7, no. 1 (2024): 178–92.
- Kenedi, John. “Dinamika Politik Hukum (Upaya Check and Balances Kekuasaan Kehakiman).” *Al Ijarah Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2016, 1–13.
- Kennedy, Alexander. “Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Subjektif.” *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)* Vol. 3, no. 4 (2025): 1–8.
- Kurdi, Dio Ashar, and Teuku Ahmad Dadek. “Pertanggungjawaban Negara Atas Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) Dalam Sistem Hukum Administrasi Indonesia.” *Unes Journal of Swara Justitia* Volume 10, no. 1 (2026): 55–67.
- Kurniawati, Dian, and Elva Imeldatur Rohmah. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Prinsip Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 5, no. 2 (2024): 183–207.
- Lubis, Maryam Salampessy & Arie Fahmi. “Peran Hukum Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Analisis Bibliometrik Atas Kontribusi Penelitian (Protection of Human Rights).” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* Volume 2, no. 8 (2023): 660–68.
- Mohamad, Muzakir Syah S. “Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Negara Hukum: Dilema Implementasi Dan Reformasi Hukum Di Indonesia.” *Judge : Jurnal Hukum* Volume 06, no. 03 (2025): 699–711.
- Nugraha, Wisnu. “Fungsi Legislasi Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Studi Kasus Badan Legislasi DPR RI Periode 2004-2009).” *Binamulia Hukum* Vol. 7, no. 2 (2018): 157–68.
- Pamungkas, Ryan Fachryan Lesmana Putra & Nandang. “Kedudukan Constitutional Complaint Dalam Mahkamah Konstitusional.” *Journal of Dual Legal Systems* Vol. 2, no. 1 (2025): 25–45.
- Pratama, Ali Gilang, Alma Elvira Saputri, Ana Rahayu, Titin Pujianti, Ratiani Puspitasari, Suryaningsi, and Endang Herlia. “Dan, Politik Hukum Dalam Legislasi Nasional: Studi Kritis Terhadap Proses Arah Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia.” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* Vol. 5, no. 2 (2025): 249–58.
- Purnamasari, Galuh Candra. “Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (Constitutional

- Complaint).” *Veritas et Justitia* Volume 3, no. 2 (2017): 244–69.
- Rato, Dominikus, Fendi Setyawan, Hudzaifa Rochmatil Husniah, Vina Lailia Agustina, and William Franz Hasiholan Sihite. “Konstitusionalitas Pasal-Pasal Dalam UU Cipta Kerja: Telaah Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konstitusional.” *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* Vol. 2, no. 3 (2023): 305–17.
- Ridlwan, Zulkarnain. “Pengaduan Konstitusional Di Negara Federal Jerman.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5, no. 3 (2011): 1–16.
- Ririhena, Putri Jean, Lucia Charlota Octavina Tahamata, and Wilshen Liatemia. “Serangan Terhadap Warga Sipil Oleh Organisasi Papua Merdeka Dan Pertanggungjawabannya.” *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* Volume 5, no. 2 (2025): 108–15.
- Rosadi, Azhar Alfian, Muhamad Dwi Nur Arifin, and Yusuf Fendi Kurniawan. “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Hak Konstitusional Di Indonesia.” *Nagari Perdikan: Journal of Law and Policy Studies* Volume 1, no. 1 (2024): 15–22.
- Sagala, Herdi Munte & Christo Sumurung Tua. “Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* Vol. 8, no. 2 (2021): 183–92.
- Sewpersadh, Prenisha, and John C. Mubangizi. “Judicial Review of Administrative and Executive Decisions: Overreach, Activism or Pragmatism?” *Law Democracy & Development* Volume 21 (2017): 201–20.
- Sihombing, Arifin. “Upaya Hukum Terhadap Keputusan Administrasi Pemerintah Yang Merugikan Masyarakat Di Sumatera Utara.” *Journal of Innovative and Creativity* Volume 6, no. 1 (2026): 1330–37.
- Sinatra, Kadek Bagus Rakyan Dana, I Nyoman Gede Sugiarta, and I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar. “Sanksi Pidana Terhadap Organisasi Masyarakat Yang Melakukan Pemerasan Berserta Ancaman Kepada Pedagang Di Pasar Satria Denpasar.” *Jurnal Analogi Hukum* Volume 5, no. 3 (2023): 317–22.
- Soehalim, Jose Andre. “Pengembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penerapan Pengaduan Konstitusional Di Indonesia.” *Lex Administratum* Vol. VIII, no. 1 (2020): 32–42.
- Subechi, Imam. “Mewujudkan Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Volume 1, no. 3 (2012): 339–58.
- Sugianto, Bambang, Windi Arista, and Muhammad Nur Amin. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Hak Konstitusional Warga Negara.” *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4, no. 3 (2026): 466–76.
- Sunarto. “Prinsip Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* Jilid 45, no. 2 (2016): 157–63.
- Suparto. “Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam.” *Hukum Islam* Volume 19, no. 1 (2019): 134–49.
- Ula, Syarifatul. “Peran Aktor Non-Negara Dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch Dalam Krisis Kemanusiaan Di Myanmar.” *Journal of International Relations* Volume 3, no. 3 (2017): 19–28.

Vielen Clarrisa Carolina Wanta et al. “Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pengaduan Konstitusional Sebagai Hak Konstitusional Negara.” *Lex Privatum* Vol. XI, no. 4 (2023).

Wijaya, Rangga. “Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” *IJOLLARES: Indonesia Journal of Law Research* Vol. 1, no. 1 (2023): 22–27.

Winanto, Wahyu Andika, and Hendrawarman. “Pengeluaran Tahanan Demi Hukum Yang Telah Habis Masa Penahanan Guna Mengurangi Fenomena Overcrowding Di Rutan Kelas I Depok.” *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial* Volume 3, no. 3 (2025): 101–6.

Zees, Sri Wahyuni. “Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Menjamin Kepentingan Umum: Studi Kasus Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Di Indonesia.” *Jurnal Mahasiswa Humanis* Vol. 5, no. 1 (2025): 403–16.

c) Peraturan Perundang-Undangan

Bundestag. Bundesverfassungsgesetz, Pub. L. No. BGBl. I S. 243 (1951).

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pub. L. No. UU No. 7 Tahun 2017 (2017).

———. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. UU No. 1 Tahun 2023 (2023).

———. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Pub. L. No. UU No. 11 Tahun 2005 (2005).

———. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, Pub. L. No. UU No. 12 Tahun 2005 (2005).

———. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pub. L. No. UU No. 12 Tahun 2011 (2011).

———. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pub. L. No. UU No. 24 Tahun 2003 (2003).

———. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pub. L. No. UU No. 30 Tahun 2014 (2014).

———. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pub. L. No. UU No. 48 Tahun 2009 (2009).

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (1847).

Majelis Permusyawaratan Rakyat. Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen (2002).

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, and Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. “Keputusan Bersama

Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.0505 Tahun 2020, Nomor, 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol, Dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front.” Jakarta, 2020.

National Assembly of the Republic of Korea. 대한민국헌법, Pub. L. No. Constitution No. 1 (1948).

National Assembly of the Republic of Korea. 헌법재판소법, Pub. L. No. Act No. 17469 (1988).

Parlamentarischer Rat. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (1949).

Parliament of the Republic of South Africa. Constitution of the Republic of South Africa Second Amendment Act, 2001, Pub. L. No. Act No. 61 of 2001 (2001).

d) Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012(2012).

———. “Putusan Nomor 103/PUU-XX/2022.” Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2022.

———. “Putusan Nomor 129/PUU-XXIII/2025.” Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2025.

———. “Risalah Sidang Permohonan Nomor 144/PUU-XXIV/2026.” Jakarta, 2026.

Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta. Putusan Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT (2019).

e) Website

Andarista, Nabila Ulva. “Overstaying Di Lapas Dan Rutan, Perlukah Kita Khawatir?” Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, 2025. <https://kemenimipras.go.id/publikasi-2/kolom-opini/overstaying-di-lapas-dan-rutan-perlukah-kita-khawatir>.

ASH. “Hakim Palguna: MK Potensial Kebanjiran Perkara Constitutional Complaint.” HukumOnline.Com, 2016. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-palguna--mk-potensial-kebanjiran-perkara-iconstitutional-complaint-i-lt57b2ec9cefbf2/>

Damayanti, Marlina. “Mengenal Konsep Pemidanaan Restorative Justice Dan Rehabilitative Di Indonesia Dari Pendekatan Historis.” Kementerian Keuangan, 2025.<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/18009/MENGENAL-KONSEP-PEMIDANAAN-RESTORATIVE-JUSTICE-DAN-REHABILITATIVE-JUSTICE-DI-INDONESIA-DARI-PENDEKATAN-HISTORIS.html>.

Desi, Uity. “Perbedaan Perusahaan Nasional Dan Multinasional.” Lancang Kuning.Com Media Masa Kini, 2021. <https://lancangkuning.com/post/35108/perbedaan-perusahaan-nasional-dan-multinasional.html>.

- Farisi, Mochammad. "Kelalaian Negara Dan Internationally Wrongful Act Di Balik Disfungsi Demokrasi Internal Partai." *Hukum Online.Com*, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kelalaian-negara-dan-internationally-wrongful-act-di-balik-disfungsi-demokrasi-internal-partai-lt69364ecbef581/?page=3>.
- Hadi, Sholikul. "Kedudukan Permohonan Dalam Pengujian Undang-Undang." UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021. <https://fsyariah.uinkhas.ac.id/berita/detail/kedudukan-permohonan-dalam-pengujian-undang-undang>.
- Hardika, Romi. "Perlindungan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi: Derden Verzet Atau Gugatan?" Dandapala, 2026. <https://dandapala.com/article/detail/perlindungan-pihak-ketiga-terhadap-eksekusi-derden-verzet-atau-gugatan>.
- Jayanti, Hanifah Dwi. "Hambatan Eksekusi Putusan Pengadilan Masih Jadi Tantangan Hukum Indonesia." *Hukum Online.Com*, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hambatan-eksekusi-putusan-pengadilan-masih-jadi-tantangan-hukum-Indonesia-lt68aed54b9f5e3/>.
- Khomsah, Aida. "Apa Itu Konflik Horizontal?" *Kemenag Nusa Tenggara Timur*, 2023. <https://ntt.kemenag.go.id/opini/725/apa-itu-konflik-horizontal-modal-deteksi-dini-konflik-umat-beragama-part-2>.
- Law, LSD: "Legal Definitions - Extraordinary Remedy." *LSD: Law's Legal Dictionary*, 2026. <https://definitions.lsd.law/extraordinary-remedy>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "FGD FH UII : Urgensi, Relevansi, Dan Mekanisme Kewenangan Pengaduan Konstitusional." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025. <https://www.mkri.id/berita/fgd-fh-iii-urgensi-relevansi-dan-mekanisme-kewenangan-pengaduan-konstitusional-24187>.
- . "Sejarah Dan Perkembangan." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025. [mkri.id/peradilan/sejarah-dan-perkembangan](https://www.mkri.id/peradilan/sejarah-dan-perkembangan).
- . "Sejarah Singkat." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025. <https://www.mkri.id/peradilan>.
- Munawaroh, Nafiatul. "Apa Itu Open Legal Policy?" *Hukum Online.Com*, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-open-legal-policy%3F-lt5460bcac21ce7/>.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Aturan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Perdata." *Hukum Online.Com*, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-permohonan-peninjauan-kembali-perkara-perdata-lt4a0bd93d0f7ac/>.
- Perera, Ayesh. "Perusahaan Transnasional (TNC)." *SimplyPsychology*, 2026. <https://www.simplypsychology.org/transnational-corporations-tncs.html>.
- Purwanti, Maidah. "Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia." *Artikel Cerdas Hukum*, 2026. <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=362>.
- Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum. "Hukum Pidana: Konsep, Tujuan, Dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum Indonesia." *PKBH UINSSC*, 2025.

<https://pkbh.uinssc.ac.id/hukum-pidana-konsep-tujuan-dan-implementasinya-dalam-sistem-hukum-Indonesia/>.

Putra, Ardiansyah Iksaniyah. “Mengembalikan Wibawa Putusan: Reformasi Eksekusi Perdata Di Indonesia.” Dandapala, 2026. <https://dandapala.com/article/detail/mengembalikan-wibawa-putusan-reformasi-eksekusi-perdata-di-Indonesia>.

Putra, Muhammad Aljabbar. “Mewujudkan Asas Peradilan Yang Cepat, Sederhana, Dan Berbiaya Murah Dalam Pelaksanaan Eksekusi.” ARUNIKA: Artikel Hakim Nusantara, 2025. <https://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/baca-artikel/-mewujudkan-asas-peradilan-yang-cepat--sederhana--dan-biaya-murah-dalam-pelaksanaan-eksekusi-/a-316arnCJqqR>.

Raji, Pahrur. “Konteks Dan Pemahaman Umum Tentang Kedudukan Dan Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan.” Mahkamah Agung RI, 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/drs-h-pahrur-raji-m-hi>.

Rastika, Nirmala Maulana Achmad & Icha. “Pemerintah Setujui Revisi UU MK Meski Akademisi Usulkan Tolak.” Kompas, 2023. https://nasional.kompas.com/read/2023/02/16/07095331/pemerintah-setujui-revisi-uu-mk-meski-akademisi-usulkan-tolak?lgn_method=google&google_btn=onetap.

Redaksi Daerah. “Kejanggalan Terhadap Putusan PN Padang, Sampai Proses Pelaksanaan Eksekusi Dilakukan.” Media Suara Mabes, 2024. <https://www.suaramabes.com/kejanggalan-terhadap-putusan-pn-padang-sampai-proses-pelaksanaan-eksekusi-dilakukan/>.

Redaksi Hukum. “Penghuni Lama Kecewa, Eksekusi Yang Dilakukan PN Blitar Dinilai Janggal.” Serayunusantara, 2026. <https://serayunusantara.com/penghuni-lama-kecewa-eksekusi-yang-dilakukan-pn-blitar-dinilai-janggal/>.

Sahbani, Agus. “MK Tak Berwenang Nilai Yurisprudensi MA.” Hukum Online.Com, 2012. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-tak-berwenang-nilai-yurisprudensi-ma-lt4f61dd18cab4a/>.

Ulum, Wizdan. “Urgensi Penegakan Hukum Di Negara Berkedaulatan.” Universitas Stekom, 2025. <https://stekom.ac.id/artikel/urgensi-penegakan-hukum-di-negara-berkedaulatan#:~:text=Dalam negara berdaulat%2C hukum berfungsi sebagai alat,pelanggaran hukum ditindak secara adil dan konsisten>.

United Nations Development Programme. “Youth and Media for Responsible Business: Bisnis Bertanggung Jawab Hak Asasi Terjaga Mendorong Bisnis Berkeadilan Dan Berkelanjutan.” United Nations Development Programme, n.d. <https://www.undp.org/Indonesia/projects/Indonesia-business-and-human-rights-agents-change>.

United Nations Human Rights Treaty Bodies. “UN Treaty Body Database.” United Nations Human Rights Treaty Bodies. Accessed April 4, 2025. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=80&Lang=EN#:~:text=CCPR - International Covenant on Civil and Political Rights.

Widodo, Tri. “Menyimak Kembali Checks and Balances Dalam Sistem

Ketatanegaraan Di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,” 2010. <https://www.triwidodowutomo.id/2010/11/menyimak-kembali-checks-and-balances.html?m=1>.

Yogyakarta, Pengadilan Agama. “Jumlah Dan Jenis Pelanggaran.” Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas IA, 2021. <https://www.pa-yogyakarta.go.id/jumlah-dan-jenis-pelanggaran>.

Yudhistira. “Jenis-Jenis Perusahaan Di Indonesia Dan Perbedaannya.” Bhinneka Update, 2025. <https://www.bhinneka.com/blog/jenis-perusahaan/>.

f) Konferensi

Anjarsari, Lulu. “ICCIS Ke-7: Berbagi Pengalaman Menerapkan Pengaduan Konstitusional Di Berbagai Negara.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025.

